

ABSTRAK

BATASAN KEWENANGAN KLINIS DAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI *TELEMEDICINE* BERBASIS APLIKASI

Oleh

CHANDRIKA KARISA ADHALIA

Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Namun, keberadaan *telemedicine* tidak didukung kesiapan regulasi yang mengatur dan menjadi payung hukumnya sehingga terjadi sebuah kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan bagi dokter dan juga pengawasan terhadap dokter yang berpraktek *telemedicine* yang berpotensi menimbulkan permasalahan tuntutan sengketa medik hingga dugaan malpraktik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kedudukan aplikasi penyedia layanan *telemedicine* di dalam transaksi terapeutik praktik kedokteran, kedudukan Surat Izin Praktik (SIP) dokter dalam praktik *telemedicine* dan batasan kewenangan klinis yang dapat dilakukan seorang dokter dalam memberikan pelayanan jasa medis berupa *telemedicine*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa bahan pustaka, bahan hukum sekunder dan hasil wawancara narasumber. Hasil penelitian menemukan aplikasi penyedia layanan *telemedicine* bukan merupakan Fasyankes resmi, SIP yang digunakan sebagai persyaratan dalam *telemedicine* berbasis aplikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan batasan kewenangan klinis praktek secara *telemedicine* ialah pertukaran informasi diagnosis (konsultasi) serta pengobatan, dan pencegahan penyakit dengan tatalaksana awal di rumah dan pemberian obat-obatan diluar golongan narkotika, psikotropika dan obat keras.

Kata Kunci: Kewenangan Klinis, Praktik Kedokteran, *Telemedicine*.

ABSTRACT

BOUNDARIES OF CLINICAL AUTHORITY AND MEDICAL PRACTICE THROUGH APPLICATION-BASED TELEMEDICINE

By

CHANDRIKA KARISA ADHALIA

Telemedicine is remote health services by health professionals using information and communication technology, including the exchange of information on diagnosis, treatment, prevention of disease and injury, research and evaluation, and continuing education of health service providers for the benefit of improving individual and community health. However, the existence of telemedicine is not supported by the regulations that regulate and become the legal protection. According to that condition, so that there is a legal gap in the regulation of protection for doctors and also supervision of doctors who practice telemedicine which has the potential to cause problems with claims for medical disputes and allegations of malpractice. The research aims to determine the position of telemedicine service provider applications in medical practice therapeutic transactions, the position of a doctor's Practice License in telemedicine practice and the limits of clinical authority that a doctor can exercise in providing medical services in the form of telemedicine. This study uses a normative juridical method by analyzing library materials, secondary legal materials and the results of interviews with informants. The results of the study found that the telemedicine service provider application was not an official health facility, the Practice License used as a requirement in application-based telemedicine was not in accordance with applicable regulations, and the limitations of clinical authority for telemedicine practice were consultation and initial therapy.

Keywords: Clinical Authority, Medical Practice, Telemedicine